



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HAIRUL
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 646167

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 931.150.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m²/120 m² di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, WARISAN Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 6423 m² di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, WARISAN Rp. 321.150.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 304 m²/12 m² di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
4. Tanah Seluas 373 m² di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 401.000.000

1. MOBIL, SUZUKI JIMNY KATANA Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, HONDA SPM R 2 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, HONDA CITY HATCHBACK HONDA/(523) CITY HB 1.5L RS CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 50.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 106.128.102

F. HARTA LAINNYA

Rp. 55.000.000

Sub Total

Rp. 1.543.278.102

III. HUTANG

Rp. 286.881.516

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.256.396.586



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.